

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>LEMBAR PENETAPAN PENGUJI.....</b>	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....</b>	v
<b>ABSTRAK.....</b>	vi
<b>ABSTRACT.....</b>	vii
<b>MOTTO.....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ix
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.....</b>	xii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....	15
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	15
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	16
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	21
1.6 Sistematika Penelitian.....	21

**BAB II KEWENANGAN KPK DALAM LELANG TERHADAP BENDA SITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM *INKRACHT VAN GEWIJSDE***

2.1 Lelang Benda Sitaan Kasus Korupsi.....	23
2.2 Lelang Tanpa Keputusan Pengadilan Yang Tetap ( <i>Inkracht Van Gewijsde</i> ) Dengan Dasar Meminimalisir Penurunan Nilai Barang.....	39
2.3 Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Melelang Benda Sitaan Kasus Korupsi Yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ( <i>Inkracht Van Gewijsde</i> ).....	49

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK OBJEK LELANG OLEH APARAT PENEGAK HUKUM (KPK) YANG KEMUDIAN PERKARANYA DIPUTUS BEBAS OLEH PENGADILAN**

3.1 Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif.....	65
3.2 Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dapat Dilakukan Pemilik Objek Lelang Benda Sitaan Yang Diputus Bebas.....	68
3.3 Gugatan Pembatalan Lelang Yang Perkaranya Diputus Bebas.	77

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Saran.....	89

**DAFTAR BACAAN**